

Judul : Menteri Bagikan BLSM Di Dapil
Tanggal : Selasa, 25 Juni 2013
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 2

Menteri Bagikan BLSM di Dapil

Ditengarai sebagai Kampanye Terselubung untuk Pemilu

JAKARTA—Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang menjadi calon legislator (caleg) membagi-bagikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di daerah pemilihan (dapil) mereka.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai cara pemerintah membagikan BLSM tersebut menunjukkan ada motif politik untuk kepentingan Pemilu 2014. Terlebih, bantuan kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tersebut dibagikan langsung oleh menteri yang menjadi caleg.

"Pembagian BLSM dibagikan menteri yang tidak ada kaitannya dan dibagikan di dapilnya. Apa yang kita curigai selamaini akhirnya terbukti," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) ini di Gedung DPR, Jakarta kemarin.

Beberapa menteri yang ikut dalam seremoni pembagian BLSM, antara lain Menteri ESDM Jero Wacik di Bali yang juga dapilnya pada Pemilu 2014. Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo melakukan pembagian BLSM di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Sabtu (22/6) sore yang juga dapilnya. Menteri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang turun membagikan BLSM di dapilnya adalah Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri di Makassar dan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring di Medan.

Menteri Negara Koperasi dan UKM Syarif Hasan ikut juga membagikan BLSM. Namun, tidak dilakukan di dapilnya di Jabar, tapi di Kantor Pos Jakarta Timur. Beberapa menteri lain yang ikut dalam seremoni tersebut adalah Menko Kesra Agung Laksono (Partai Golkar), Menko Perekonomian Hatta Rajasa (PAN), Menteri Kelautan dan Perikanan Shafiq C. Sutardjo (Partai Golkar), dan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, dan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Menurut Pramono Anung, pembagian BLSM oleh menteri di dapil masing-masing menunjukkan mereka memanfaatkan momentum tersebut untuk kampanye terselubung. Kalau para menteri ingin ikut bagi-bagi BLSM, mestinya dilakukan di daerah lain yang tidak terkait kepentingan politiknya pada Pemilu 2014. Namun, seremoni pemberian BLSM dilakukan di dapil masing-masing sehingga pantas dikritisi. "Sekelompok orang terutama menteri-menteri yang juga jadi caleg untuk memanfaatkan itu. Nah, ini yang sebenarnya dikhawatirkan," ujar mantan Sekjen DPP PDI ini.

"Pembagian BLSM dibagi-bagikan menteri yang tidak ada kaitannya dan dibagikan di dapilnya. Apa yang kita curigai selama ini akhirnya terbukti."

PRAMONO ANUNG
Wakil Ketua DPR

Menurut Pramono, kalau kemudian BLSM ini betul-betul murni, kenapa kemudian harus ada seremonial sementara yang ditugaskan sudah ada. Kenapa juga ada menteri yang sebenarnya tak terkait, namun ikut hadir dan membagikan serta menunggu hingga berjam-jam. Ini menunjukkan apa yang kita khawatirkan terjadi "bahwa telah dimanfaatkan untuk kepentingannya," katanya.

Selain menyoroti karena

BLSM menjadi ajang kampanye terselubung, Pramono juga mengkritik pembagian BLSM yang tidak tepat sasaran. Menurut dia, masyarakat yang masuk dalam kategori masyarakat miskin ternyata malah banyak yang tidak menefitisi BLSM. Bahkan ada yang menerbitkan BLSM langsung untuk bay utang, ujarnya.

Sementara itu, Ketua DP Irmam Gusmani mengimbau agar BLSM tidak dijadikan sebagai sarana untuk mencari dukungan publik menjelang Pemilu 2014. Irmam mengatakan sangat wajar jika publik mencurigai motif menteri yang memantau langsung pemberian BLSM tersebut. Terlebih la menteri yang melakukan pemantauan tidak berkaitan dengan BLSM dan dilakukan daerah pemilihannya.

Sekretaris Fraksi Part Hanura DPR Saleh Husin mengatakan, sejak awal pihaknya sudah memprediksi BLSM akan digunakan untuk kepentingan tertentu. Untuk itu, saat ini pengawasan harus ditingkatkan agar tidak menjadi alat kampanye terselubung.

Menteri ESDM Jero Wacik menegaskan, pembagian BLSM bukan untuk kepentingan politik ataupun pencitraan. Dengan BLSM, masyarakat kecil atau penerima BLSM mampu beradaptasi dengan dampak kenaikan harga BBM.

"Ini bukan politik. Ini untuk rakyat kita agar sampai kepada yang berhak," kata Wacik saat membagikan BLSM di Kantor Pos Setean Denpasar Bali kemarin.

Dia meminta kepada penerima BLSM menggunakan bantuan sebesar Rp300.000 seirif mungkin. Dia memastikan seluruh penerima BLSM akan mendapatkan haknya. "In empat bulan. Dulu kan buru-buru. Sekarang tidak boleh taluk kehabisan. Uangnya ada di kantor pos, jadi tenang saja, kata caleg Partai Demokrat di dapil Bali ini."

● rahmat sahid,
miftachul chusni